



Pemkot Akan Cabut Izin Operasi Jukir Nakal

YOGYAKARTA—Pemkot Yogyakarta tak lagi memberi toleransi kepada juru parkir (jukir) yang kedapatan lebih dari tiga kali melanggar aturan. Sanksi tegas disiapkan, yaitu pencabutan izin operasi.

"Kami akan bertindak tegas agar benar-benar ada efek jera," tandas Kasi Pengendalian dan Operasi, Bidang Perparkiran, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Asung Waluyo, kemarin.

Jukir nakal adalah jukir yang menarik tarif parkir lebih dari ketentuan sesuai Perda Retribusi Parkir serta jukir yang tidak memberikan karcis parkir kepada warga yang memarkirkan kendaraannya. Jika dicabut izinnya, kata Asung, jukir

itu tak boleh lagi beroperasi dan posisinya akan diganti oleh jukir lainnya yang resmi terdaftar di Dinas Perhubungan.

Menurut dia, setiap kali terkena razia, jukir nakal diberi surat peringatan dan perjanjian yang berisi tidak akan mengulangi perbuatan melanggar perda. Dengan sanksi tegas ini, dia berharap para jukir bekerja sesuai aturan.

Terlebih saat ini sudah ada Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) sehingga jukir nakal yang terjaring razia tak hanya terancam sanksi pencabutan izin, juga akan diproses hingga pengadilan.

Pada Sabtu (25/2), Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

dan Satpol PP menjaring empat jukir di kawasan Titik Nol Kilometer. Keempat jukir itu sudah diajukan untuk disidang di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta. Keempatnya melanggar Perda No 19/2009 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (TJU).

"Meski ada keterbatasan jumlah petugas, siang malam kami terus razia," tandas Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Wirawan Hario Yudo.

Yudo tak memungkiri pelanggaran parkir terus terjadi. Sebelumnya, pada awal Januari lima jukir di kawasan Alun-alun Selatan dan Utara terjaring razia Satgas Saber Pungli. Kelimanya sudah divonis oleh

pengadilan dengan denda masing-masing Rp100.000.

Wirawan mengakui, rendahnya sanksi denda tak mencitki jukir untuk mengulangi perbuatannya. Namun, pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena yang memutuskan hukuman adalah hakim.

Sementara itu, Wakil Ketua Satgas Saber Pungli Kota Yogyakarta Wahyu Widayat mengaku siap membantu Dinas Perhubungan dan Satpol PP merazia jukir nakal. "Hingga sekarang kami jalan terus (menyelidiki dan mengkaji kasus parkir). Hal ini agar tidak ada lagi persoalan parkir di Kota Yogyakarta," ujarnya.

ristu hanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005